

BAB I

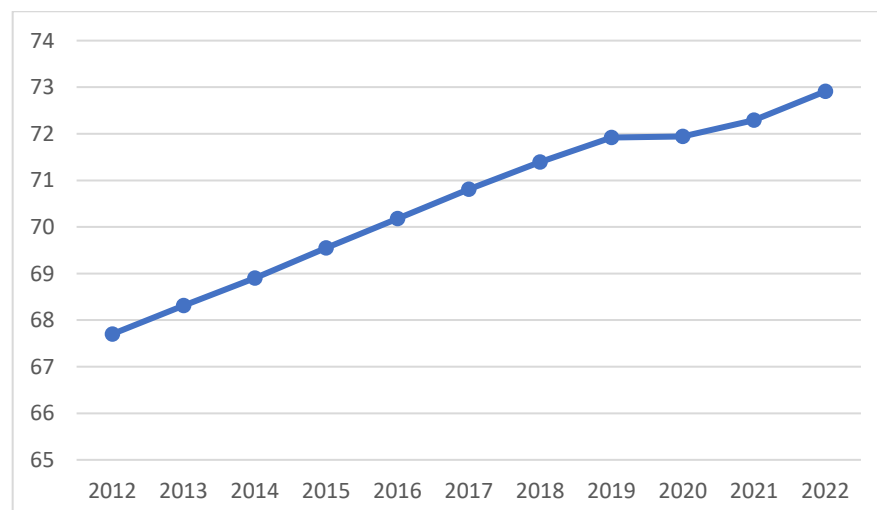
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kualitas manusia di Indonesia telah mengalami peningkatan. Fenomena ini tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia yang secara konsisten mencapai kategori Pembangunan Manusia Tinggi (BPS, 2020). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di negara ini. Pemerintah telah melakukan beberapa program di berbagai sektor sebagai upaya perbaikan (kemenkeu, 2023). Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas. Di bidang pendidikan, upaya tersebut mencakup pembangunan kembali gedung sekolah yang rusak, penerapan program wajib belajar selama 12 tahun, dan peningkatan kualitas sekolah melalui penyempurnaan kurikulum. Upaya pemerintah juga terfokus pada peningkatan kualitas pendidik atau guru dengan menerapkan sertifikasi bagi guru pegawai negeri sipil. Dalam sektor kesehatan, pemerintah telah meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Selain itu, perbaikan kualitas dilakukan dalam bentuk peningkatan alat-alat kesehatan dan infrastruktur puskesmas serta rumah sakit daerah di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Dua sektor ini terus mendapat perhatian dari pemerintah setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan dalam peringkat IPM di ASEAN, Indonesia berada pada urutan keempat. Meskipun demikian, terdapat disparitas yang signifikan dalam IPM di antara 33 provinsi di Indonesia. Hanya dua provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, yang memiliki rentang IPM antara 75-80 persen (BPS, 2012). Fenomena ini menjadi menarik karena hanya dua provinsi di Pulau Jawa yang mencapai rentang IPM di atas 75 persen, sementara empat provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, masih memiliki IPM di bawah rentang 75 persen.

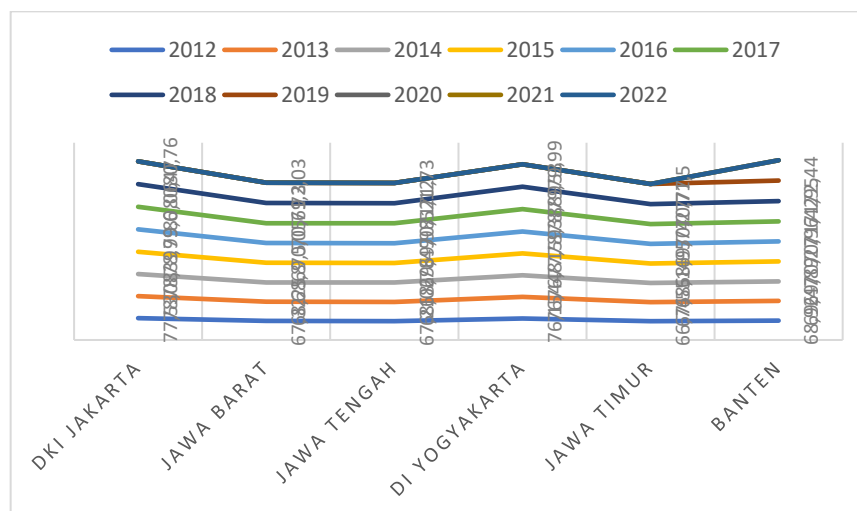
IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks sektor pendidikan, indeks sektor kesehatan, dan jumlah kemiskinan. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Berikut adalah gambar data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun 2012-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Data IPM Indonesia tahun 2012-2022 (persen)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Indonesia menaik dari tahun 67,70 pada tahun 2012 menjadi 72,91 pada 2022. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2016– 2019, IPM Indonesia tumbuh 0,90 persen. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 0,02 persen diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya perekonomian di Indonesia. Dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2021-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik

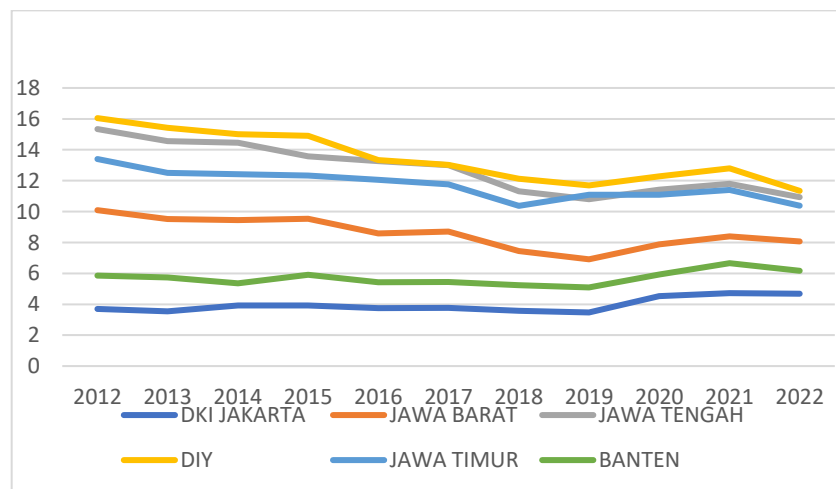
Gambar 1. 2 Data IPM pada 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2022 (persen)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat Provinsi Jawa Timur selalu memiliki IPM terendah di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki IPM tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan IPM setiap tahunnya. DKI Jakarta yang merupakan Provinsi dengan IPM tertinggi yaitu 81,65 kemudian diikuti DIY dengan 80,64 lalu ada Banten 73,32 kemudian Jawa Barat 73,12 lalu Jawa Tengah mengikuti 72,79 dan yang terakhir Jawa Timur 72,75 IPM Jawa Timur merupakan yang terendah di Pulau Jawa, hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan unsur-unsur pembangunan manusia antara lain: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Menurut Ginting (2008), pembangunan manusia di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Menanam investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan akan memiliki dampak lebih besar bagi penduduk yang berada dalam kondisi miskin daripada bagi mereka yang tidak miskin, karena tenaga kerja kasar merupakan aset utama dari penduduk miskin. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dapat secara signifikan berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan dengan demikian, meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Capaian IPM Provinsi di Pulau Jawa memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut, namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM di Pulau Jawa yang diharapkan. Laju Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tidak secepat kenaikan persentase kemiskinan. Persentase kemiskinan pada 6 Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2012-2022 dapat dilihat dalam gambar 1.3 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012-2022 (persen)

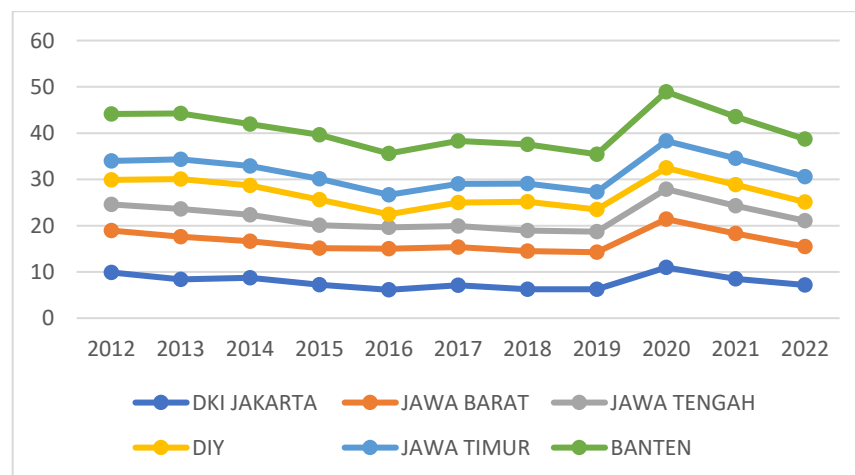
Dilihat dari gambar 1.3 yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi DI Yogyakarta, dan diposisi kedua Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur berada diposisi tertinggi ke tiga dengan presentase sebesar 10.38, sedangkan dilihat dari jumlah penduduk termiskin dalam jiwa, provinsi Jawa Timur juga berada di urutan tertinggi. Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa mengalami ketidakstabilan dan selalu mengalami perubahan. Persentase tingkat kemiskinan dari tahun 2017 sampai 2021 terus mengalami perubahan naik turun atau fluktuasi di setiap Provinsi di pulau Jawa. Meski perubahannya tidak terlalu tinggi, namun tetap saja perubahan tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian. Perekonomian yang baik

dicerminkan dari penurunan tingkat kemiskinan yang semakin terus menurun dari tahun ketahun.

Pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang berada di ambang kemiskinan, terutama di perkotaan, karena kelompok ini sangat rentan dan mudah terperosok ke dalam tingkat kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna mengurangi tingkat kemiskinan. Jumlah angkatan kerja yang besar menuntut adanya peluang atau lapangan kerja yang lebih banyak. Lapangan kerja biasanya berasal dari pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selalu menghasilkan lapangan kerja yang mencukupi. Oleh karena itu, selalu ada sebagian angkatan kerja yang tidak dapat diserap oleh pasar, dikenal sebagai penganggur, dan rasio penganggur terhadap total angkatan kerja disebut sebagai tingkat pengangguran.

Pengangguran menjadi indikator penting dalam menilai output ketenagakerjaan, menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, tingginya tingkat pengangguran memiliki dampak sosial yang meluas karena menjadi penyebab utama kemunculan kemiskinan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial. Dari perspektif ekonomi, individu yang mengalami pengangguran tidak memiliki pendapatan, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan konsumsi. Secara keseluruhan, kondisi ini berarti melemahkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan mengurangi efisiensi ekonomi wilayah tersebut, dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi mencerminkan inefisiensi yang lebih besar dalam perekonomian regional.

Nur Baeti dalam penelitiannya tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan Manusia. Hal ini berarti ketika pengangguran semakin tinggi maka indeks pembangunan manusia menjadi turun, begitu juga sebaliknya jika tingkat pengangguran menurun maka indeks pembangunan manusia meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2012-2022
(persen)**

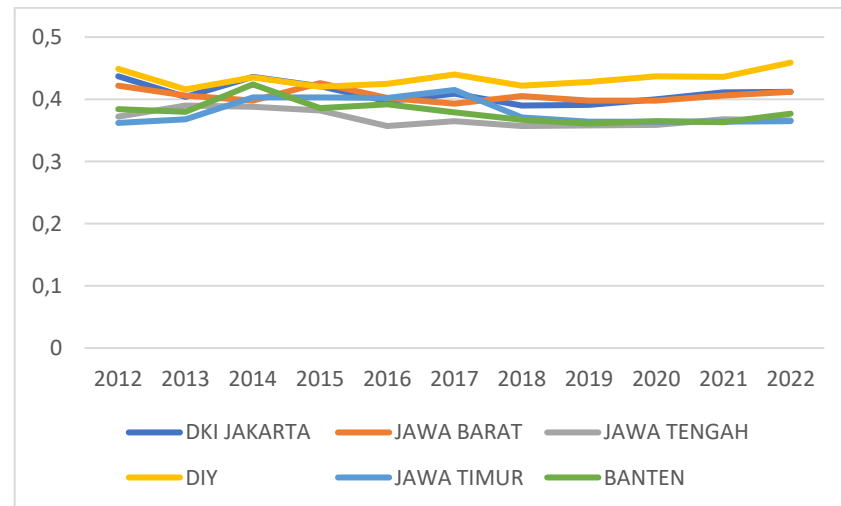
Perkembangan pengangguran 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2012-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif menurun dari rata-rata 7,06 persen di tahun 2010 menjadi 6,25 persen di tahun 2018 kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 sebesar 8,15 persen. Hal ini dikarenakan dampak pandemi *covid-19* yang terjadi di Indonesia. Peningkatan pengangguran merupakan imbas dari pemberlakuan *lockdown* sebagai bentuk usaha pemerintah untuk mengantisipasi

terjadinya penularan virus. Namun pada kenyataannya justru berakibat pada pertumbuhan ekonomi salah satunya peningkatan angka pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi disparitas pendapatan di antara anggotanya. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang krusial. Kesenjangan terjadi ketika pendapatan suatu masyarakat di suatu wilayah lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan pendapatan yang terbatas ini, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, yang secara langsung berdampak pada perkembangan manusia.

Banyak negara berkembang cenderung lebih fokus pada pemanfaatan modal daripada tenaga kerja dalam aktivitas ekonominya, sehingga keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Jika pendapatan nasional tidak didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dianggap terjadi ketidaksetaraan Hartono (2008). Menurut Todaro dan Smith (2006), ketidaksetaraan pada kenyataannya tidak dapat dihapuskan dalam pembangunan suatu wilayah. Adanya ketidaksetaraan mendorong wilayah yang tertinggal untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak tertinggal jauh dari wilayah sekitarnya. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut akan bersaing untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketidaksetaraan dalam hal ini dapat memberikan dampak positif. Namun, ada pula dampak negatif yang timbul dari ketidaksetaraan yang semakin tinggi antar wilayah. Dampak negatif tersebut meliputi

ketidaksetaraan ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketidaksetaraan yang tinggi umumnya dianggap tidak adil.

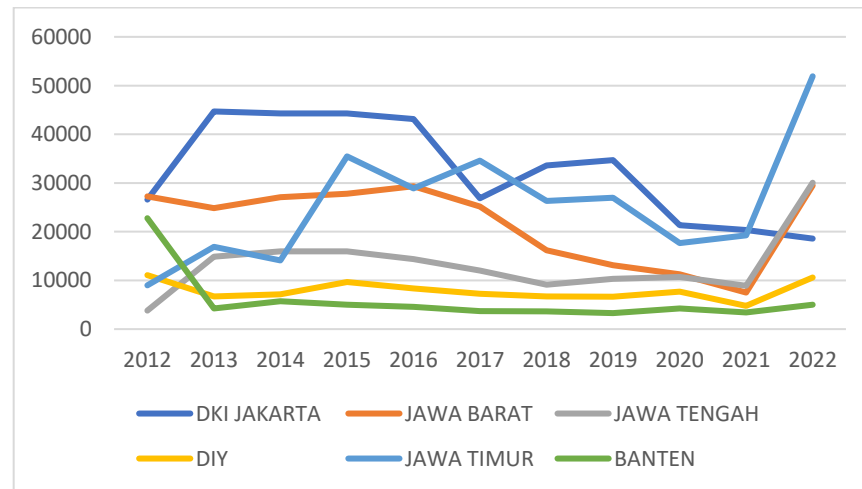


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 5 Tingkat Gini Rasio di Pulau Jawa tahun 2012-2022

Berdasarkan gambar 1.5 dapat diketahui bahwa nilai Gini Rasio di Pulau Jawa tahun 2012-2022 fluktuatif. Selain itu, tahun 2012-2022 posisi angka Gini Rasio di Pulau Jawa masih ada yang berada di atas angka Gini Rasio nasional. Angka ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa masih tinggi meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan perekonomian.

Selain beberapa faktor di atas, ada faktor lain yang mempengaruhi pembangunan manusia yaitu kejahatan/kriminalitas. Kejahatan akan merugikan masyarakat secara *material* atau *imaterial*, serta merugikan negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 6 Jumlah Kriminalitas di Pulau Jawa tahun 2012-2022

Data survei di Pulau Jawa Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) tahun 2012-2022 fluktuatif cenderung menurun. Penurunan tingkat kejahatan di pulau jawa sangatlah drastis dari tahun ke tahun. Tingkat kejahatan yang paling tinggi di antara ke 6 provinsi yang lainnya adalah Jawa Timur yakni sebesar 51,905 kejadian. Alasan kenapa tingkat kejahatan di Jawa Timur paling tinggi, Daerah ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat industrialisasi yang tinggi. Beberapa sektor utama di Jawa Timur meliputi industri manufaktur, petrokimia, pertanian, dan perdagangan. Kota Surabaya, sebagai ibu kota provinsi, juga menjadi pusat kegiatan bisnis dan perdagangan yang penting di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa Faktor seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 6 Provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

terhadap Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Kriminalitas pada 6 Provinsi di Pulau Jawa”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pengangguran?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kriminalitas secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kriminalitas

1.4 Kegunaan Penelitian

1.1.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi ilmiah dalam menambah pengetahuan dan wawasan baru. Khususnya dalam penelitian ini menggunakan variabel kriminalitas, dikarenakan kebanyakan dalam penelitian lain hanya menggunakan variabel kemiskinan dan pengangguran saja. Penelitian dengan variabel yang serupa ini dikategorikan sebagai penelitian yang jarang diteliti. Oleh karena itu, diharapkan dengan menambahkan variabel Kriminalitas ini dapat memberikan kontribusi ilmiah.

1.1.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana pengaruh variabel ekonomi makro terhadap indeks pembangunan manusia provinsi di Pulau Jawa.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama serta permasalahan yang sama, ataupun ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi para pembaca.
3. Bagi pemerintah, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam masalah indeks pembangunan manusia, dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat terhadap pemerintah

